



# **LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

## **“OPTIMALISASI ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA”**

**NAMA : MUNI ASMUNI, S.E**  
**NIP. : 19640901 198703 1 001**  
**N D H : 22**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2019**

## ABSTRAK

Pencapaian fungsi pemerintah tidak terlepas dari proses pelaksanaan anggaran yang kemudian menghasilkan besaran realisasi terhadap besaran pagu anggaran. Tantangan dalam pencapaian tersebut adalah meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, untuk mengakomodasi inovasi yang dibutuhkan dalam peningkatan penyerapan anggaran, dengan tetap memegang asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.

Optimalisasi administrasi pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang secara kuantitatif mengukur kinerja dan kualitas pelaksanaan APBN. Mobilisasi dengan *stakeholder* internal maupun eksternal dilakukan untuk mencapai keberhasilan proyek perubahan ini. Mobilisasi yang dilakukan menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran yang mempercepat realisasi anggaran serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Sinergi para *stakeholder* mampu meningkatkan realisasi dan kinerja pelaporan keuangan eselon I dengan penetapan prosedur baku dan dokumen rencana tindak lanjut dalam rangka mengefektifkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang harus diimplementasikan secara menyeluruh.

Proyek perubahan terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa harus terus dilanjutkan untuk memastikan reformasi keuangan negara yang mendukung terwujudnya *good governance*.